



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas dan Nilai jabatan Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

18. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
19. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
20. Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi yang ditentukan berdasarkan nomenklatur jabatan pelaksana dari kementerian yang berwenang.
2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 10 Agustus 2021

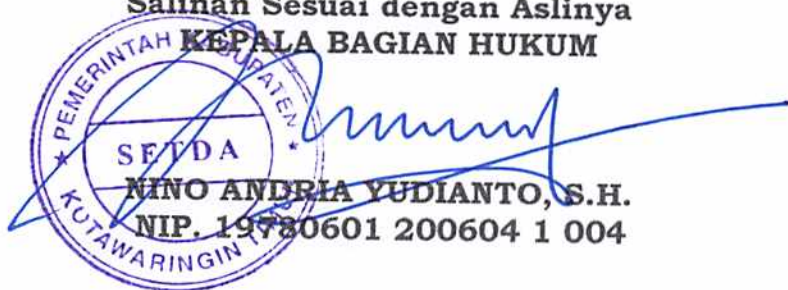
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



NO	NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, PELAKSANA DAN FUNGSIONAL TERTENTU		INSTANSI	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4	5	6
	15	PETUGAS KEAMANAN	KECAMATAN TUALAN HULU	4	413
	16	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	KECAMATAN TUALAN HULU	9	1430
	17	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN TUALAN HULU	6	690
	18	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN TUALAN HULU	7	890
	19	KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN TUALAN HULU	9	1430
	20	ANALIS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KECAMATAN TUALAN HULU	7	890
	21	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	KECAMATAN TUALAN HULU	9	1430
	22	ANALIS PEMBANGUNAN	KECAMATAN TUALAN HULU	7	890
	23	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KECAMATAN TUALAN HULU	9	1430
	24	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	KECAMATAN TUALAN HULU	7	890
	25	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI	KECAMATAN TUALAN HULU	9	1430
	26	ANALIS DATA DAN INFORMASI	KECAMATAN TUALAN HULU	7	890

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H.
NIP. 19780601 200604 1 004

NO	NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, PELAKSANA DAN FUNGSIONAL TERTENTU		INSTANSI	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4	5	6
	15	PETUGAS KEAMANAN	KECAMATAN TUALAN HULU	4	413
	16	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	KECAMATAN TUALAN HULU	9	1430
	17	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	KECAMATAN TUALAN HULU	6	690
	18	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN TUALAN HULU	7	890
	19	KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN TUALAN HULU	9	1430
	20	ANALIS PERLINDUNGAN MASYARAKAT	KECAMATAN TUALAN HULU	7	890
	21	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	KECAMATAN TUALAN HULU	9	1430
	22	ANALIS PEMBANGUNAN	KECAMATAN TUALAN HULU	7	890
	23	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KECAMATAN TUALAN HULU	9	1430
	24	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	KECAMATAN TUALAN HULU	7	890
	25	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI	KECAMATAN TUALAN HULU	9	1430
	26	ANALIS DATA DAN INFORMASI	KECAMATAN TUALAN HULU	7	890

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H.
NIP. 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TABEL KELAS DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR, PENGAWAS, PELAKSANA DAN FUNGSIONAL TERTENTU		INSTANSI	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN
1	2	3	4	5	6
I	SEKRETARIAT DAERAH				
	1	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	15	3555
	2	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK	SEKRETARIAT DAERAH	13	2715
	3	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH	13	2715
	4	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	SEKRETARIAT DAERAH	13	2715
	5	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	14	3030
	6	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	12	2315
	7	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	9	1430
	8	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	7	890
	9	ANALIS PERTANAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	890
	10	PENGELOLA DATA SENGKETA PERTANAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	6	690
	11	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	6	690
	12	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	9	1430
	13	ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	7	890
	14	ANALIS SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	890
	15	ANALIS TOPONIMI DAN DATA WILAYAH	SEKRETARIAT DAERAH	7	890
	16	PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	6	690
	17	KEPALA SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	9	1430
	18	ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	7	890
	19	PENGELOLA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	6	690
	20	PENGELOLA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	6	690
	21	PENGADMINISTRASI OTONOMI DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	5	490
	22	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH	12	2315
	23	KEPALA SUB BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL	SEKRETARIAT DAERAH	9	1430
	24	ANALIS RUMAH IBADAH	SEKRETARIAT DAERAH	7	890
	25	PENYUSUN BAHAN PENGEMBANGAN PROGRAM KEAGAMAAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	890
	26	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	SEKRETARIAT DAERAH	7	890
	27	PENYUSUN BAHAN PEMBINAAN MASJID	SEKRETARIAT DAERAH	7	890
	28	PENGELOLA BANTUAN KEAGAMAAN	SEKRETARIAT DAERAH	6	690
	29	PENGELOLA DATA	SEKRETARIAT DAERAH	6	690
	30	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	SEKRETARIAT DAERAH	5	490